

Implementasi dan Tantangan Anggaran Responsif Gender: Studi Literature

Harrey Hadi

Program Doktor Administrasi Publik, Universitas Sriwijaya, Indonesia.

Abstrak

Anggaran Responsif Gender (ARG) merupakan pendekatan penting dalam pengelolaan anggaran publik yang bertujuan untuk mengintegrasikan dimensi gender dalam proses perencanaan, alokasi, dan penggunaan anggaran. Penulis melakukan Studi Literatur untuk menginvestigasi pendekatan ARG dalam konteks implementasi dan tantangannya di dalam dan luar negeri. Kami menganalisis sepuluh jurnal terdiri dari lima jurnal nasional dan lima jurnal internasional yang membahas implementasi ARG dari tahun 2016 hingga 2023. Temuan kami menunjukkan bahwa ARG memiliki potensi besar untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik, serta menjadi wujud dari *good governance* dalam pengelolaan anggaran daerah. Namun, implementasi ARG dihadapkan pada sejumlah tantangan, termasuk rendahnya partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan terkait anggaran, diskriminasi terhadap perempuan, serta kurangnya pemahaman dan kesadaran tentang gender di kalangan penyusun anggaran dan masyarakat umum. Selain itu, kami menemukan bahwa kurangnya alokasi anggaran yang memadai, ketidakpastian mengenai keefektifan dan keefisienan dalam pengelolaan anggaran daerah, dan resistensi masyarakat terhadap konsep gender juga menjadi hambatan dalam implementasi ARG. Temuan ini menyoroti perlunya upaya yang berkelanjutan dan terkoordinasi untuk mengatasi tantangan-tantangan ini agar ARG dapat mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan dalam menciptakan pelayanan publik yang lebih adil, inklusif, dan responsif terhadap gender.

Kata kunci:

anggaran responsive gender; implementasi; tantangan, studi literatur

Pendahuluan

Studi administrasi publik tentang *gender equality* atau kesetaraan gender merupakan bidang yang berkembang pesat dalam ilmu administrasi publik. Ini adalah cabang dari penelitian yang fokus pada cara-cara di mana lembaga-lembaga publik, kebijakan, dan praktik administratif mempengaruhi atau dipengaruhi oleh isu-isu kesetaraan gender (Ratag et al., 2019). Pada dasarnya, kesetaraan gender mengacu pada prinsip bahwa semua individu, tanpa memandang jenis kelamin, memiliki hak yang sama dan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam partisipasi politik, ekonomi, dan sosial (Mahadevia et al., 2017). Studi administrasi publik tentang *gender equality* mencakup analisis kebijakan untuk mengevaluasi sejauh mana kebijakan publik, program, dan inisiatif pemerintah berkontribusi pada peningkatan kesetaraan gender atau sebaliknya (Biduri et al., 2022).

Pelayanan publik merupakan aspek krusial dalam menjaga kesejahteraan masyarakat, yang seharusnya diakses secara adil dan merata oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk berdasarkan perbedaan gender (Zarefar et al., 2021). Gender menjadi dimensi yang harus dipertimbangkan dalam perencanaan anggaran pelayanan publik untuk memastikan bahwa kebutuhan dan hak setiap individu, baik laki-laki maupun perempuan, terpenuhi secara proporsional dan berkeadilan (Tommaso et al., 2019). Meskipun telah banyak peraturan dan kebijakan yang menekankan pentingnya integrasi gender dalam perencanaan pembangunan, implementasinya masih menghadapi tantangan, terutama dalam konteks anggaran pelayanan publik (Andi Yusril Cibu, 2021).

Anggaran Responsif Gender (ARG) atau *Gender-Responsive Budgeting* (GRB) telah menjadi fokus utama dalam upaya meningkatkan keadilan gender dan inklusi sosial dalam proses pembangunan (Polzer et al., 2023). Di banyak negara, termasuk Indonesia, ketidaksetaraan gender masih menjadi tantangan serius yang mempengaruhi akses dan pemerataan manfaat pembangunan. Kesenjangan ini termanifestasi dalam berbagai aspek kehidupan, seperti akses pendidikan, layanan kesehatan, peluang kerja, serta partisipasi politik dan ekonomi (Andi Yusril Cibu, 2021). Untuk mengatasi tantangan ini, ARG menjadi suatu pendekatan yang penting untuk memastikan bahwa alokasi anggaran publik mengakomodasi kebutuhan dan kepentingan semua golongan gender, khususnya perempuan, yang sering kali terpinggirkan dalam proses pembangunan.

Pada tingkat global, komitmen untuk mewujudkan ARG telah tercermin dalam berbagai kesepakatan internasional, termasuk Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan yang menekankan pentingnya integrasi gender dalam semua aspek pembangunan (Noviani et al., 2022). Penelitian tentang implementasi dan tantangan anggaran responsif gender menjadi relevan karena meningkatnya kesadaran akan pentingnya inklusi gender dalam pembangunan serta kebutuhan untuk memastikan alokasi anggaran yang tepat dan merata. Tujuan penelitian ini adalah untuk menyelidiki sejauh mana aspek gender telah diintegrasikan dalam perencanaan anggaran pelayanan publik di dalam dan luar negeri beserta tantangannya.

Pemahaman tentang dinamika gender dalam perencanaan anggaran pelayanan publik tidak hanya untuk memastikan akses dan pemerataan pelayanan publik yang lebih baik, tetapi juga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang berharga bagi pembuat kebijakan, praktisi, dan akademisi untuk memperkuat praktik perencanaan anggaran pelayanan publik yang lebih berpihak pada gender, sehingga mampu memberikan manfaat maksimal bagi seluruh anggota masyarakat, tanpa terkecuali.

Metode

Metode yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah studi literatur di mana hasil dari sintesisnya dapat dijadikan rujukan untuk penelitian mendatang. Penelitian ini menggunakan teknik studi literatur yang tidak sistematis dengan memanfaatkan penelitian yang dipublikasikan pada jurnal nasional maupun internasional yang membahas topik perencanaan anggaran berbasis gender dari periode tahun 2014 hingga 2023. Dalam proses pencarian jurnal, digunakan beberapa keyword seperti "implementasi", "tantangan", "pelayanan publik", dan "anggaran responsif gender". Jurnal-jurnal yang ditemukan kemudian disaring dengan membaca keseluruhan isi jurnal, dan dipilihlah sepuluh jurnal yang relevan untuk digunakan dalam studi literatur ini. Hasil penelitian ini dapat menjadi tambahan pengetahuan bagi penelitian tentang perencanaan anggaran berbasis gender di Indonesia dan tantangannya. Studi literatur ini juga dapat digunakan sebagai referensi dan sumber informasi bagi pemangku kepentingan dalam merancang perencanaan anggaran pelayanan publik yang lebih inklusif secara gender.

Hasil dan Pembahasan

Hasil dari pencarian jurnal didapatkan sepuluh jurnal terdiri dari lima jurnal nasional dan lima jurnal internasional yang relevan dengan kata kunci dan topik studi literatur. Daftar jurnal yang digunakan dalam studi literatur ini ditampilkan dalam Tabel 1.

Tabel 1.

Daftar jurnal yang digunakan dalam studi literatur

No	Judul Artikel, Penulis dan Tahun	Lokus Kasus	Metode Penelitian	Permasalahan Penelitian dan Hasil Penelitian
1	Urgensi Kebijakan Penyelenggaraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam Mewujudkan Kesejahteraan Perempuan <i>Aga Natalis, 2020</i>	Kabupaten Sekadau, Provinsi Kalimantan Barat, Indonesia	Kualitatif	Permasalahan: rendahnya partisipasi perempuan dalam pengambilan kebijakan terkait anggaran di daerah, serta masih adanya bentuk praktek diskriminasi terhadap perempuan. Hasil: penerapan Anggaran Responsif Gender (ARG) dalam kebijakan penyelenggaraan APBD dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi anggaran, serta menjadi wujud dari <i>good governance</i> dalam pengelolaan anggaran daerah. Namun, terdapat hambatan dalam implementasi ARG, seperti kesalahpahaman yang luas, kurangnya SDM, ketiadaan lembaga pengarusutamaan gender, serta ketiadaan alokasi anggaran untuk profil gender dan pelatihan gender

No	Judul Artikel, Penulis dan Tahun	Lokus Kasus	Metode Penelitian	Permasalahan Penelitian dan Hasil Penelitian
2	Integrasi Anggaran Responsif Gender Dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah <i>Nur Khaerah, 2016</i>	Makasar, Indonesia	Kualitatif	Permasalahan: kurangnya integrasi anggaran responsif gender dalam APBD Dinas Kesehatan Kota Makassar tahun 2014. Kendala kebijakan, struktural, dan kultural menjadi hambatan utama dalam implementasi anggaran responsif gender. Dukungan politik yang minim, kurangnya pemahaman program-program gender, serta norma budaya yang mempengaruhi persepsi terhadap isu gender. Hasil: Adanya dugaan integrasi anggaran responsif gender dalam APBD Dinas Kesehatan Kota Makassar tahun 2014. Meskipun terdapat peningkatan dalam beberapa indikator kesehatan seperti Usia Harapan Hidup dan Angka Kematian Bayi, masih terdapat kelemahan dalam mencapai target peningkatan Akses Layanan Kesehatan Masyarakat dan Angka Kematian Ibu. Kendala kebijakan, struktural, dan kultural menjadi tantangan utama yang perlu diatasi untuk meningkatkan efektivitas integrasi anggaran responsif gender di tingkat daerah.
3	Perencanaan dan Partisipasi Penyusunan Anggaran Berperspektif Gender pada Pemerintah Daerah <i>I Made Pradnya, 2020</i>	Indonesia	Kuantitatif	Permasalahan: kurangnya perhatian terhadap perspektif gender dalam perencanaan dan partisipasi penyusunan anggaran di pemerintah daerah. Hasil: terdapat pengaruh antara perencanaan anggaran terhadap anggaran berperspektif gender. Hal ini mengimplikasikan bahwa keterlibatan perempuan dalam proses perencanaan anggaran dapat menentukan anggaran yang lebih adil. Namun, tidak ditemukan pengaruh antara partisipasi penyusunan anggaran terhadap anggaran berperspektif gender. Hal ini mungkin disebabkan oleh sedikitnya peran perempuan sebagai perangkat penyusun anggaran.
4	Persepsi Penyusun Anggaran Mengenai Konsep Kebijakan Anggaran Responsif Gender <i>Galuh Retno Widowati, Unti Ludigdo, Ari Kamayan, 2016</i>	Kota Probolinggo, Jawa Timur, Indonesia	Kualitatif	Permasalahan: kurangnya pemahaman atau kesadaran dari penyusun anggaran di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo mengenai konsep kebijakan Anggaran Responsif Gender (<i>Gender Responsive Budgeting/GRB</i>). Hal ini dapat mengakibatkan ketidaksetaraan dalam alokasi anggaran antara laki-laki dan perempuan, serta kurangnya perhatian terhadap kebutuhan dan aspirasi perempuan dalam proses perencanaan anggaran. Hasil: pemahaman penyusun anggaran terkait kebijakan GRB masih perlu ditingkatkan. Implementasi kebijakan GRB di Kota Probolinggo pada tahun pertama belum sepenuhnya responsif gender, dengan

No	Judul Artikel, Penulis dan Tahun	Lokus Kasus	Metode Penelitian	Permasalahan Penelitian dan Hasil Penelitian
				beberapa kegiatan khusus perempuan yang belum dialokasikan. Tantangan yang dihadapi antara lain ketiadaan peraturan daerah yang berlaku, kurangnya kemampuan analisis gender, resistensi masyarakat terhadap konsep gender, dan persepsi penyusun anggaran yang meragukan urgensi kebijakan GRB.
5	Anggaran Responsif Gender Sebagai Suatu Instrumen Negara Untuk Pemenuhan Hak Perempuan Di Indonesia <i>Syarifah Ida Farida, 2018</i>	Indonesia	Kualitatif	Permasalahan: kurangnya pengungkapan fakta gender dalam dokumen anggaran dan kebijakan terkait, serta kebutuhan akan kemampuan teknis dan advokasi untuk mempengaruhi penyusunan anggaran. Hasil: tantangan dalam implementasi Anggaran Responsif Gender sebagai kebijakan publik yaitu kurangnya kemampuan teknis dalam memahami anggaran pemerintah dan menerapkan perspektif gender ke dalam anggaran, serta kemampuan advokasi dan negosiasi untuk mempengaruhi penyusunan anggaran..
6	Local Government Budgeting For Gender Equality. <i>Hakan Turan, Ayse Senturk, 2016</i>	Istanbul	<i>Hierarchical Clustering Analysis</i>	Permasalahan: <i>Gender-Responsive Budgeting</i> (GRB) di tingkat pemerintah lokal dianggap krusial untuk memastikan kesetaraan dalam penyediaan layanan, perencanaan, dan penggunaan dana municipal secara efektif dan efisien. Hasil: analisis 39 distrik di Istanbul Metropolitan Municipality, distrik Fatih menjadi yang paling menonjol dalam penerapan GRB. Distrik-distrik lama cenderung lebih luas dalam penerapan GRB dibandingkan dengan distrik-distrik baru.
7	Gender Responsive Budgeting in India <i>Vibhuti Patel, 2018</i>	India	Kualitatif	Permasalahan: kurangnya pemahaman dan kesadaran tentang pentingnya integrasi dimensi gender dalam proses anggaran. Ketidakmampuan dalam mengidentifikasi dan mengukur dampak kebijakan anggaran terhadap perempuan, laki-laki, dan kelompok minoritas seksual. Hasil: diperlukan peningkatan kesadaran tentang isu-isu gender di kalangan pembuat kebijakan dan masyarakat umum. Peningkatan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran publik melalui pendekatan yang responsif terhadap gender. Peningkatan akses perempuan dan kelompok minoritas seksual terhadap layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan.
8	The implementation of gender equality within the South African	Afrika Selatan	Kualitatif	Permasalahan: adanya laporan dan studi yang menunjukkan bahwa perempuan cenderung menduduki posisi manajemen yang lebih rendah dan mengalami

No	Judul Artikel, Penulis dan Tahun	Lokus Kasus	Metode Penelitian	Permasalahan Penelitian dan Hasil Penelitian
	Public Service (1994–2019) <i>Ayola Bangani, Shikha Vyas-Doorgapersad, 2021</i>			keterlambatan dalam kemajuan karier mereka dalam sektor publik. Hasil: beberapa rekomendasi yaitu mendorong departemen dan lembaga pemerintah untuk meningkatkan representasi perempuan dalam posisi manajemen tingkat atas, dan memperkuat kebijakan dan kerangka kerja kesetaraan gender dalam pelayanan publik
9	Integrating Gender into Educational Planning and Budgeting <i>Rabia Tabassum, 2019</i>	Pakistan	Kuantitatif dan Kualitatif	Permasalahan: kebutuhan untuk memahami peran gender dalam perencanaan dan penganggaran pendidikan di Pakistan. Fokusnya adalah pada identifikasi ketimpangan gender dalam akses pendidikan, alokasi anggaran yang responsif terhadap gender, serta kendala-kendala dalam implementasi kebijakan pendidikan yang berpihak pada gender. Hasil: terdapat ketimpangan gender dalam akses pendidikan, dengan persentase anak-anak yang tidak sekolah lebih tinggi di kalangan perempuan dibandingkan laki-laki. Tantangan yaitu kurangnya alokasi anggaran yang memadai untuk mendukung akses pendidikan perempuan, seperti transportasi sekolah yang aman.
10	Gender budgeting in Slovenia— approaches, achievements, and complexities <i>Tatjana Stanimirović, 2021</i>	Slovenia	Kuantitatif dan Kualitatif	Permasalahan: adanya perubahan sosial, politik, dan ekonomi yang mungkin mempengaruhi pendekatan gender budgeting di Slovenia. Hasil: Slovenia telah mengambil langkah-langkah awal dalam gender responsive budgeting tanpa regulasi, namun masih terdapat kendala seperti kurangnya keinginan politik, kurangnya keterlibatan dari Kementerian Keuangan, serta kurangnya kapasitas dan pengetahuan untuk

Berdasarkan Tabel 1. yaitu perbandingan hasil dari sepuluh jurnal yang mengulas implementasi Anggaran Responsif Gender (ARG) atau *Gender- Responsive Budgeting* (GRB) di beberapa wilayah, terdapat kesamaan dan perbedaan dalam permasalahan yang dihadapi serta hasil yang dicapai. Secara umum, terdapat permasalahan yang serupa di berbagai wilayah terkait dengan implementasi ARG/GRB, seperti rendahnya partisipasi perempuan dalam pengambilan kebijakan terkait anggaran, diskriminasi terhadap perempuan (Bangani, 2020; Natalis, 2020; Turan & Senturk, 2016), kurangnya perhatian, pemahaman dan kesadaran tentang gender (Farida, 2019; Patel, 2018; Pradnya, 2020), serta kurangnya alokasi anggaran dan lembaga yang mendukung penerapan ARG/GRB (Tabassum et al., 2019). Meskipun terdapat permasalahan yang serupa, terdapat variasi dalam kendala-kendala yang dihadapi di setiap wilayah. Misalnya,

di Kota Makassar, kendala kebijakan, struktural, dan kultural menjadi hambatan utama, sedangkan di Kabupaten Sekadau, kesalahpahaman yang luas dan ketiadaan lembaga pengarusutamaan gender menjadi kendala utama (Khaerah & Mutiarin, 2016).

Implementasi ARG/GRB di beberapa wilayah menghasilkan beberapa kemajuan, namun masih terdapat tantangan dalam mencapai hasil yang diinginkan. Di Kota Probolinggo, implementasi ARG pada tahun pertama belum sepenuhnya responsif gender (Widowati et al., 2016), sementara di Pakistan, terdapat ketimpangan gender dalam akses pendidikan meskipun telah ada upaya untuk mengalokasikan anggaran yang responsif gender (Tabassum et al., 2019). Beberapa jurnal ini menawarkan rekomendasi untuk meningkatkan implementasi ARG/GRB, seperti peningkatan kesadaran dan pemahaman tentang gender, dukungan politik yang lebih kuat, pengembangan kapasitas SDM, dan penguatan lembaga pengarusutamaan gender (Stanimirović & Klun, 2021). Dengan membandingkan hasil dari sepuluh jurnal tersebut, kita dapat melihat pola umum dalam tantangan dan hasil implementasi ARG/GRB di berbagai wilayah, namun juga mengakui variasi dalam konteks dan kendala yang dihadapi di setiap tempat. Hal ini menunjukkan bahwa diperlukan pendekatan kontekstual dan berbasis bukti dalam merancang dan melaksanakan kebijakan dan program yang responsif gender.

Dalam pandangan penulis, pelaksanaan pelayanan publik harus sesuai dengan tema "*No One Left Behind*" menuntut adanya keadilan dan inklusi dalam penyediaan layanan publik. Artinya, tidak boleh ada individu atau kelompok yang terpinggirkan atau dikesampingkan dalam akses dan pemanfaatan layanan publik. Ini berarti pemerintah harus memastikan bahwa setiap warga negara, termasuk mereka yang berada dalam kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas, dan masyarakat adat, memiliki akses yang sama terhadap layanan publik yang berkualitas. Dalam konteks ini, pelaksanaan pelayanan publik haruslah merujuk pada prinsip kesetaraan, keadilan, dan non diskriminasi.

Selanjutnya, terkait dengan konsep keberlanjutan (*sustainability*), pelaksanaan pelayanan publik harus dirancang dan diimplementasikan secara berkelanjutan agar dapat memenuhi kebutuhan tidak hanya untuk generasi saat ini, tetapi juga untuk generasi mendatang. Hal ini mencakup aspek-aspek seperti efisiensi penggunaan sumber daya, perlindungan lingkungan, dan peningkatan kapasitas institusi untuk memastikan kontinuitas pelayanan publik yang berkelanjutan dari waktu ke waktu. Dengan demikian, keberlanjutan dalam konteks pelayanan publik berarti mempertimbangkan dampak jangka panjang dari kebijakan dan praktik yang diimplementasikan, serta mengintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan dalam setiap tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program dan layanan publik (Kraan et al., 2013).

Anggaran Responsif Gender (ARG) merupakan pendekatan yang bertujuan untuk memastikan bahwa anggaran pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah mencerminkan kebutuhan dan kepentingan dari semua golongan gender, baik laki-laki maupun perempuan, serta mengakui dan mengatasi ketimpangan gender yang ada (Rubin & Bartle, 2005). Perbandingan antara ARG di dalam dan di luar negeri berdasarkan Tabel 1. dapat dilihat dari beberapa aspek, seperti:

1. Kebijakan dan Regulasi. Beberapa negara telah mengembangkan kebijakan dan regulasi yang mendorong integrasi gender dalam perencanaan dan penyediaan pelayanan publik. Banyak negara telah mengadopsi undang-undang dan kebijakan yang lebih kuat terkait pengarusutamaan gender dalam berbagai aspek pembangunan, termasuk pelayanan publik. Misalnya, integrasi gender dalam perencanaan dan penganggaran pendidikan di Pakistan. United Nations Development Programme (UNDP), yang merupakan badan program Perserikatan Bangsa-Bangsa yang bertujuan untuk mempromosikan pembangunan berkelanjutan, telah berkolaborasi dengan pemerintah Pakistan untuk memperkenalkan *Gender Responsive Budgeting* (GRB) pada tahun 2005 (Tabassum et al., 2019).
2. Pendanaan dan Anggaran. Perencanaan anggaran pelayanan publik berbasis gender masih menghadapi tantangan dalam pengalokasian dana yang cukup untuk mengimplementasikan program-program yang mendukung kesetaraan gender (Turan & Senturk, 2016). Terdapat upaya untuk meningkatkan alokasi anggaran yang responsif gender. Negara-negara maju cenderung memiliki sumber daya yang lebih besar dan komitmen yang lebih kuat dalam mengalokasikan dana untuk program-program yang mendukung kesetaraan gender dalam pelayanan publik. Mereka sering kali memiliki mekanisme penganggaran khusus atau alokasi anggaran terpisah yang ditujukan secara khusus untuk inisiatif-inisiatif gender.
3. Kesadaran dan Pendidikan. Kesadaran tentang pentingnya ARG telah meningkat di banyak negara, tetapi masih diperlukan upaya untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran di tingkat masyarakat dan lembaga pemerintahan (Patel, 2018). Negara-negara maju cenderung memiliki tingkat kesadaran dan pemahaman yang lebih tinggi tentang isu-isu gender dan perlunya integrasi gender dalam pelayanan publik. Mereka juga sering kali memiliki program-program pendidikan dan pelatihan yang terstruktur untuk meningkatkan pemahaman tentang ARG di kalangan pejabat pemerintah dan masyarakat.

Sementara ada perbedaan dalam pendekatan dan implementasi antara ARG di dalam dan di luar negeri, ada juga banyak kesamaan dalam upaya untuk mewujudkan anggaran pelayanan publik yang lebih inklusif dan responsif gender di seluruh dunia. Meskipun demikian, ada tantangan yang dihadapi dan upaya yang dilakukan dalam ARG dapat bervariasi antara negara-negara, tergantung pada konteks sosial, budaya, politik, dan ekonomi masing-masing. Berdasarkan Tabel 1. mengenai sepuluh jurnal yang membahas implementasi ARG di dalam dan luar negeri, terdapat sejumlah tantangan yang umumnya dihadapi dalam konteks implementasi ARG, yaitu:

1. Rendahnya partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan. Salah satu tantangan yang umum dihadapi adalah rendahnya partisipasi perempuan dalam proses pengambilan keputusan terkait anggaran. Hal ini dapat mengakibatkan ketidaksetaraan dalam alokasi anggaran dan kurangnya perhatian terhadap kebutuhan dan aspirasi perempuan dalam proses perencanaan anggaran.
2. Diskriminasi terhadap perempuan. Masih adanya bentuk-bentuk praktek diskriminasi terhadap perempuan juga menjadi tantangan serius dalam implementasi ARG/GRB. Diskriminasi ini dapat menghambat upaya untuk menciptakan anggaran yang adil dan merata antara laki-laki dan perempuan.
3. Kurangnya pemahaman dan kesadaran tentang gender. Tantangan lainnya adalah kurangnya pemahaman dan kesadaran tentang gender di kalangan penyusun anggaran dan masyarakat umum. Hal ini dapat menghambat upaya untuk mengintegrasikan dimensi gender dalam perencanaan dan penganggaran.
4. Kurangnya alokasi anggaran dan lembaga pendukung. Implementasi ARG/GRB seringkali dihadapi dengan kurangnya alokasi anggaran yang memadai dan lembaga pendukung yang mendukung penerapan kebijakan dan program yang responsif gender.
5. Kesalahpahaman dan ketidakpastian. Kesalahpahaman yang luas tentang konsep dan manfaat ARG/GRB juga menjadi tantangan, bersama dengan ketidakpastian mengenai keefektifan dan keefisienan dalam pengelolaan anggaran daerah.
6. Tantangan kebijakan, struktural, dan kultural. Di beberapa wilayah, implementasi ARG/GRB dihambat oleh tantangan kebijakan, struktural, dan kultural yang kompleks, seperti minimnya dukungan politik, kurangnya pemahaman tentang program-program gender, dan norma budaya yang mempengaruhi persepsi terhadap isu gender.

7. Kurangnya kemampuan analisis gender. Tantangan lainnya adalah kurangnya kemampuan analisis gender di kalangan penyusun anggaran, yang dapat menghambat upaya untuk memahami dan mengatasi ketimpangan gender dalam alokasi anggaran.
8. Tantangan keterlibatan perempuan dalam proses perencanaan. Tantangan yang dihadapi di beberapa wilayah adalah kurangnya peran aktif perempuan sebagai perangkat penyusun anggaran, yang dapat mengurangi representasi dan perspektif gender dalam perencanaan anggaran.
9. Resistensi masyarakat terhadap konsep gender. Resistensi masyarakat terhadap konsep gender juga menjadi tantangan, karena dapat menghambat implementasi kebijakan dan program yang responsif gender.
10. Ketidakmampuan dalam memahami anggaran pemerintah. Beberapa studi juga menyoroti tantangan terkait dengan ketidakmampuan dalam memahami anggaran pemerintah dan menerapkan perspektif gender ke dalam anggaran.

Tantangan-tantangan ini memerlukan upaya yang berkelanjutan dan terkoordinasi untuk diatasi agar implementasi ARG/GRB dapat mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan dalam menciptakan anggaran yang lebih adil, inklusif, dan responsif terhadap gender.

Kesimpulan

Dalam menghadapi masa depan, implementasi Anggaran Responsif Gender (ARG) memerlukan gagasan inovatif untuk memastikan kesetaraan gender terwujud dalam pengelolaan anggaran publik. Beberapa gagasan inovatif yang dapat diterapkan di masa yang akan datang yaitu meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya ARG di kalangan penyusun kebijakan, praktisi, dan masyarakat umum. Program pendidikan dan pelatihan yang menyeluruh tentang konsep dan manfaat ARG perlu ditingkatkan untuk memperkuat kapasitas dalam menerapkan pendekatan ini. Selain itu perlu dilakukan pengembangan alat dan metode analisis yang inovatif untuk memfasilitasi identifikasi, pengukuran, dan pemantauan dampak kebijakan dan program anggaran terhadap kesetaraan gender. Pendekatan baru dalam pengumpulan dan pengolahan data dapat membantu penyusun anggaran dalam mengambil keputusan yang lebih berbasis bukti.

Dalam konteks ARG, diperlukan juga untuk mengembangkan strategi pemberdayaan perempuan yang holistik dan terpadu. Ini termasuk peningkatan partisipasi perempuan dalam proses pengambilan keputusan terkait anggaran, promosi kewirausahaan perempuan, serta akses yang lebih luas terhadap pendidikan dan pelatihan. Kolaborasi lintas sektor dan jaringan

kerja yang kuat perlu dibangun untuk memperkuat implementasi ARG. Kerja sama antara pemerintah, organisasi masyarakat sipil, sektor swasta, dan lembaga internasional dapat mempercepat pembangunan kapasitas dan penyebaran praktik terbaik terkait ARG.

Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dapat menjadi kunci dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi pengelolaan anggaran dengan pendekatan gender. Pengembangan aplikasi dan platform digital untuk pengumpulan data, pelaporan, dan pemantauan dapat memfasilitasi partisipasi masyarakat dan memperkuat akuntabilitas publik. Dengan menerapkan gagasan-gagasan inovatif ini, diharapkan ARG dapat menjadi lebih efektif dan relevan dalam mengatasi tantangan kesetaraan gender dalam pengelolaan anggaran publik di masa yang akan datang. Inovasi merupakan kunci untuk menciptakan perubahan positif yang berkelanjutan dan memastikan bahwa pelayanan publik menjadi lebih inklusif, adil, dan responsif terhadap kebutuhan semua individu.

Daftar Pustaka

- Andi Yusril Cibu, A. F. A. (2021). Responsive Gender on Budgeting Planning; A Compliance Audit Study on Public Sector. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 6(9), 21–49.
- Bangani, A. (2020). The implementation of gender equality within the South African Public Service (1994–2019). *Africa's Public Service Delivery and Performance Review*, 110. <https://doi.org/10.7551/mitpress/9781906897710.003.0040>
- Biduri, S., Rahma Dewi, S., & Usrotin, I. (2022). Urgensi Penerapan Anggaran Responsif Gender Di Pemerintah Daerah (Studi Pada Kabupaten Sidoarjo). *Procedia of Social Sciences and Humanities*, 3(Proceedings of the 1st SENARA 2022), 1394–1403. <https://pssh.umsida.ac.id>.
- Farida, S. I. (2019). Anggaran Responsif Gender Sebagai Suatu Instrumen Negara Untuk Pemenuhan Hak Perempuan Di Indonesia. *Jimf (Jurnal Ilmiah Manajemen Forkamma)*, 1(2), 67–86.
- Khaerah, N., & Mutiarin, D. (2016). Integrasi Anggaran Responsif Gender Dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. *Journal of Governance and Public Policy*, 3(3), 413–445. <https://doi.org/10.18196/jgpp.2016.0065>
- Kraan, D.-J., von Trapp, L., Kostyleva, V., van Tuinen, J., & Morgner, M. (2013). Budgeting in Ukraine. *OECD Journal on Budgeting*, 12(2), 69–140. <https://doi.org/10.1787/budget-12-5k4c1s8n0br0>

- Mahadevia, D., Bhatia, N., & Sebastian, R. (2017). *Gender Responsive Budget Analysis of Urban Development Sector*. April, 154. [http://files/9/Mahadevia et al. - Gender Responsive Budget Analysis of Urban Develop.pdf](http://files/9/Mahadevia%20et%20al.%20-%20Gender%20Responsive%20Budget%20Analysis%20of%20Urban%20Develop.pdf)
- Natalis, A. (2020). Urgensi Kebijakan Penyelenggaraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam Mewujudkan Kesejahteraan Perempuan. *Pandecta Research Law Journal*, 15(1), 64–73. <https://doi.org/10.15294/pandecta.v15i1.23205>
- Noviani, I., Adnan, M., & Alfirdaus, L. K. (2022). Analisis Hambatan Pengarusutamaan Gender Dalam Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018–2023. *Journal of Politic and Government Studies*, 12(1), 269–283. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/37147>
<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/download/37147/28300>
- Patel, V. (2018). Gender Responsive Budgeting in India. *Journal of Development Research*, 11(3), 1. <https://doi.org/10.54366/jdr.11.3.2018.01-12>
- Polzer, T., Nolte, I. M., & Seiwald, J. (2023). Gender budgeting in public financial management: a literature review and research agenda. *International Review of Administrative Sciences*, 89(2), 450–466. <https://doi.org/10.1177/00208523211031796>
- Pradnya, I. M. (2020). Perencanaan dan Partisipasi Penyusunan Anggaran Berperspektif Gender pada Pemerintah Daerah. *Public Management and Accounting Review*, 1(1), 45–58. <https://doi.org/10.61656/pmar.v1i1.37>
- Ratag, W. A., Kumenaung, A. G., & Engka, D. S. M. (2019). Pengaruh Perencanaan Anggaran Terhadap Penyerapan Anggaran Di Lingkungan Universitas Sam Ratulangi. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 20(2), 1. <https://doi.org/10.35794/jpek.23845.20.2.2019>
- Rubin, M. M., & Bartle, J. R. (2005). Integrating gender into government budgets: A new perspective. *Public Administration Review*, 65(3), 259–272. <https://doi.org/10.1111/j.1540-6210.2005.00452.x>
- Stanimirović, T., & Klun, M. (2021). Gender budgeting in Slovenia—approaches, achievements, and complexities. *Public Money and Management*, 41(7), 548–553. <https://doi.org/10.1080/09540962.2021.1936937>
- Tabassum, R., Manzoor, R., Ahmed, V., Zahid, J., Ikram, W., & ... (2019). *Integrating Gender into Educational Planning and Budgeting*. June. <https://www.think-asia.org/handle/11540/10799>
- Tommaso, S., Pastore, P., & ... (2019). Strategic governance and gender budgeting of local governments: Paths and experiences in Italy. *Conference on Gender*, 2006.

<https://search.proquest.com/openview/92fb0c024dc14800eb4627c0aa029646/1?pq-origsite=gscholar&cbl=4451209>

Turan, H., & Senturk, A. (2016). Local Government Budgeting for Gender Equality. *Procedia Economics and Finance*, 38(October 2015), 224–231. [https://doi.org/10.1016/s2212-5671\(16\)30194-0](https://doi.org/10.1016/s2212-5671(16)30194-0)

Widowati, G. R., Ludigdo, U., & Kamayanti, A. (2016). Persepsi Penyusun Anggaran Mengenai Konsep Kebijakan Anggaran Responsif Gender. *Journal of Research and Applications: Accounting and Management*, 2(1), 31. <https://doi.org/10.18382/jraam.v2i1.67>

Zarefar, A., Putra, F. B., & Kennedy. (2021). Pengaruh Perencanaan Anggaran, Pencatatan Administrasi, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Penyerapan Anggaran (Studi pada OPD Provinsi Riau). *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Bisnis*, 14(2), 221–230. <https://doi.org/10.35143/jakb.v14i2.4401>